LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

A. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA:

1. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI POLRI
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATFUNG MABES POLRI
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SUBSATFUNG PADA SATFUNG MABES POLRI
4. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA POLDA
5. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATFUNG/SATKER PADA POLDA
6. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA POLRES

B. FORMULIR PERJANJIAN KINERJA:

1. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI POLRI
2. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA SATFUNG/SATKER MABES POLRI
3. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA SUBSATFUNG PADA SATFUNG MABES POLRI
4. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA POLDA
5. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA SATFUNG/SATKER PADA POLDA
6. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA POLRES

C. KETERKAITAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA DENGAN FORMULIR DOKUMEN LAIN.

A. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA:

1. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BADRODIN HAITI
Pangkat : JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 20XX

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI

2. FORMAT .....

2. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATFUNG/SATKER MABES POLRI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.

Pangkat : KOMISARIS JENDERAL POLISI

Jabatan : KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BADRODIN HAITI

Pangkat : JENDERAL POLISI

Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 20XX

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
Drs. BADRODIN HAITI	Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI

3. FORMAT .....

3. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA UNIT SUBSATKER PADA SUBSATKER MABES POLRI

BADAN PEMELIAHARA KEAMANAN POLRI
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. IMAM BUDI SUPENO

Pangkat : BRIGADIR JENDERAL POLISI

Jabatan : DIREKTUR POLISI PERAIRAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.

Pangkat : KOMISARIS JENDERAL POLISI

Jabatan : KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 20XX

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI	DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI
Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.	Drs. IMAM BUDI SUPENO
KOMISARIS JENDERAL POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI

4. FORMAT .....

4. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA POLDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.

Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BADRODIN HAITI

Pangkat : JENDERAL POLISI

Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 20XX

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
Drs. BADRODIN HAITI	Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.
JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI

5. FORMAT .....

5. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATKER POLDA

KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. IMAM SUMANTRI

Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI

Jabatan : DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JABAR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.

Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 20XX

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT	DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.	Drs. IMAM SUMANTRI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI NRP ....

6. FORMAT .....

6. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA POLRES

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BOGOR KOTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRSAN, S.I.K., M.Si.

Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR KOTA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.

Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Bogor, Januari 20XX

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR KOTA
Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H	IRSAN, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050608

B. FORMULIR ....

B. FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

1. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran
1.	Rp. .....
2.	Rp. .....

Jakarta, Januari 20XX

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

1. pada kolom (1) diisi no urut;
2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Polri atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3. pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Polri yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharus dicapai oleh Polri;
5. pada kolom program diisi dengan nama program Polri yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
6. pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

2. CONTOH.....

2. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA SATFUNG/SATKER MABES POLRI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program Anggaran
1. ..... Rp. .....
2. ..... Rp. .....

Jakarta, Januari 20XX

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Penjelasan pengisian lampiran di atas sebagai berikut:

1. pada kolom (1) diisi no urut;
2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran program Satker Mabes Polri atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut;
3. pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Satker Mabes Polri yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Satker Mabes Polri pada tahun tersebut;
5. pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan Satker Mabes Polri pada tahun tersebut;
6. pada kolom anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh Satker Mabes Polri untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

3. CONTOH .....

3. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA SUBSATKER PADA SATKER MABES POLRI

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	
2.	Rp.	

Jakarta, Januari 20XX

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

DIREKTUR POLISI PERAIRAN

Drs. IMAM BUDI SUPENO
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Penjelasan pengisian lampiran di atas sebagai berikut:

1. pada kolom (1) diisi no urut;
2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran program Subsatker Mabes Polri sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3. pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Subsatker Mabes Polri yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Subsatker Mabes Polri pada tahun tersebut;
5. pada kolom Kegiatan diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
6. pada kolom anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh Subsatker Mabes Polri kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud;
7. pada kolom keterangan diisi keterangan tambahan yang penting misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN, dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

4. CONTOH .....

4. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA POLDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	
2.	Rp.	

Bandung, Januari 20XX

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. BADRODIN HATI
JENDERAL POLISI

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Dr. MOCHAMAD IRIAWAN. Drs., S.H.,M.M.,M.H
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Penjelasan pengisian lampiran di atas sebagai berikut:

1. pada kolom (1) diisi no urut;
2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran program Polda sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3. pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Polda yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Polda pada tahun tersebut;
5. pada kolom kegiatan diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
6. pada kolom anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh Polda untuk mencapai sasaran program yang dimaksud;
7. pada kolom keterangan diisi keterangan tambahan yang penting misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN, dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

5. CONTOH .....

5. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA SATKER POLDA

KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	
2.	Rp.	

Bandung, Januari 20XX

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, Drs., S.H., M.M., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

Drs. IMAN SUMANTRI, M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP ....

Penjelasan pengisian lampiran di atas sebagai berikut:

1. pada kolom (1) diisi no urut;
2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran program Satker Polda sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3. pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Satker Polda yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Polda pada tahun tersebut;
5. pada kolom Kegiatan diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
6. pada kolom anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh Satker Polda untuk mencapai sasaran program yang dimaksud;
7. pada kolom keterangan diisi keterangan tambahan yang penting misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN, dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

6. CONTOH .....

6. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA POLRES

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT BOGOR KOTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
POLRES BOGOR KOTA

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program Anggaran
1. ..... Rp. .....
2. ..... Rp. .....

Bogor , Januari 20XX

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Dr. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR KOTA

IRSAN. S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP ....

Penjelasan pengisian lampiran di atas sebagai berikut:

1. pada kolom (1) diisi no urut;
2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Polres atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3. pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Polres yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Polda pada tahun tersebut;
5. pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan tercapai;
6. pada kolom anggaran diisi dengan besar anggaran yang akan dialokasikan untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

C. KETERKAITAN .....

C. KETERKAITAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA DENGAN FORMULIR DOKUMEN LAIN

1. RENSTRA

Sasaran							Program	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	SATKER Pengemban Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

3. RENCANA KERJA TAHUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

4. PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI